

Wapres Sebut Kawasan Aglomerasi Jakarta Direncanakan Sejak Lama

KENDARI (IM) - Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, mengatakan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang akan mengatur tentang aglomerasi kawasan Jakarta dan sekitarnya sudah direncanakan sejak lama. Ma'ruf menyebut aglomerasi Jakarta dan sekitarnya sudah sesuai dengan kebutuhan.

"Ide untuk mengkoordinasikan dan mensinkronisasi terutama perencanaan Jakarta dengan sekitarnya itu sudah lama. Sudah lama. Sehingga dulu ada pikiran bahwa Jakarta harus dipimpin oleh seorang menteri yang bisa mengkoordinasi beberapa daerah," kata Ma'ruf di Kendari, Kamis (21/3).

Bahkan kata Ma'ruf pembahasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya sudah pernah dibahas ketika dirinya masih duduk di DPRD DKI Jakarta, tahun 1971 silam.

"Itu pernah dan pernah dibicarakan beberapa kali dulu saya pernah jadi anggota DPRD DKI, dan melakukan koordinasi dengan Jawa Barat, bagaimana supaya perencanaan antara Jakarta

dengan daerah sekitarnya itu sinkron. Sebab kalau tidak seperti, Depok yang mestinya jadi resapan air itu kemudian habis akhirnya air itu tidak ada resapannya kemudian langsung ke Jakarta," ucap Ma'ruf.

Dengan begitu, Ma'ruf mendukung aglomerasi Jakarta kembali dibahas. Wapres nanti akan mengkoordinasikan Jakarta dan sekitarnya ke tingkat menteri. Ma'ruf menilai wajar bila ada perbedaan persepsi bermunculan selama pembahasan RUU DKJ. Terutama mengenai aglomerasi Jakarta akan dipimpin wakil presiden.

"Saya kira itu bagus. Mungkin dipilihnya Wapres karena ini menyangkut mengkoordinasi berbagai daerah yang kalau tingkat menteri mungkin kesulitan teknisnya supaya diangkat yang lebih atas ya kalau saya mungkin hanya beberapa bulan saja kalo pun itu. Saya kira hanya untuk menyamakan persepsi saja barang kali. Belum pada tingkat operasionalnya dan ini operasionalnya nanti wakil presiden baru yang akan menanganinya," kata Wapres menambahkan. ● **yan**

4 | Metropolis

FOTO: ANT



CYRUS MARGONO RESMI MENJADI WNI
Pesepak bola Cyrus Margono berpose usai pembacaan sumpah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) di Kantor Kanwil Kementerian Dalam Negeri DKI Jakarta, Cawang, Jakarta, Kamis (21/3). Atlet yang bermain di klub Divisi 2 Liga Super Yunani, Panathinaikos B sebagai penjaga gawang tersebut resmi menjadi WNI.

SEBELUM BANGUN FOOD ESTATE

Heru Budi Diminta Penuhi Dulu Kebutuhan Warga Kepulauan Seribu

Seharusnya, Pemerintah Provinsi DKI lebih dulu memastikan apakah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, disertai akses transportasi yang memadai? Kemudian dikaji dipetakan potensi lokal kapan yang memang fleksibel untuk dioptimalisasi. Dari situ dilakukan pemenuhan jasa tadi optimalisasi berbasis hal-hal potensial, ungkap Ismail.

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono diminta terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat Kepulauan Seribu, sebelum menjalankan rencana pembangunan food estate.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan karena sampai saat ini kebutuhan dasar masyarakat di Kepulauan Seribu juga masih terbatas. "Dengarkan aspirasi masyarakat setempat, sebelum berbicara bentuk investasi. Kita pastikan dulu nih kebutuhan dasar mereka,

misalnya harga dan ketersediaan pangan, kemudian akses transportasi," ujar Ismail, Kamis (21/3).

Seharusnya, kata Ismail, Pemerintah Provinsi DKI lebih dulu memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka, disertai akses transportasi yang memadai. "Kemudian dikaji dipetakan potensi lokal kapan yang memang fleksibel untuk dioptimalisasi. Dari situ dilakukan naik kelas dari kebutuhan, kemudian pemenuhan jasa tadi optimalisasi berbasis hal-hal potensial," ungkap Ismail.

"Sekarang coba tanyain orang pulau, kebutuhan transport susah, terus sembako juga beda tarif sama daratan," sambung Ismail.

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu menjadi kawasan lumbung pangan atau Food Estate.

Hal itu disampaikan Heru Budi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Selasa (19/3). "Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi Provinsi DKI Jakarta," ujar Heru Budi dalam keterangan resminya, Selasa (19/3). Musrenbang tersebut adalah bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Untuk itu, Heru Budi menyampaikan pengembangan food estate di Kepulauan Seribu mulai harus direncanakan. Sebab, ketersediaan bahan pokok di seluruh dunia

sudah semakin berkurang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kita melihat kebutuhan, bahan pokok semakin berkurang di dunia," jelas Heru Budi.

Adapun wilayah Kepulauan Seribu dipilih karena memiliki kekayaan sumber daya alam. Dia mencontohkan cukup banyaknya hasil laut, yakni ikan, rumput laut, hingga ganggang.

"Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta," ungkap Heru Budi.

Kendati demikian, Heru Budi menegaskan setiap rencana pembangunan dan pengembangan di Kepulauan Seribu, akan disinergikan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pengembangan kawasan Kepulauan Seribu. "Perlu dilakukan sinergi bersama KLHK serta KKP, untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata," kata Heru Budi. ● **yan**



FOTO: ANTARA

FENOMENA EQUINOX 2024

Seorang anak bermain dengan latar belakang matahari bersinar terik saat fenomena Equinox? di Depok, Kamis (21/3). Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Equinox adalah fenomena yang terjadi ketika posisi Matahari berada tepat di khatulistiwa atau ekuator, secara periodik Equinox berlangsung dua kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September, hal tersebut menyebabkan wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari maksimum, dan mengakibatkan peningkatan suhu udara secara drastis.

Penonaktifan KTP Jakarta Dilakukan Selepas Lebaran

JAKARTA (IM) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta menunda penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga yang tidak lagi tinggal di Jakarta hingga setelah Idul Fitri 1445 Hijriah. Penonaktifan akan dilakukan selepas lebaran.

"Kita rencana pasca lebaran kita akan lakukan. Iya (sekitar tanggal 12 April)," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (21/3).

Menurut Budi, penonaktifan NIK warga DKI Jakarta yang tinggal di luar daerah memang lebih tepat dilakukan usai lebaran hingga akhir tahun 2024. Selain itu, Budi memastikan petugas Dukcapil DKI Jakarta tingkat provinsi dan kota juga akan melakukan verifikasi terlebih dahulu kepada warga, sebelum menonaktifkan NIK.

"Sehingga, penonaktifan NIK tidak dilakukan secara

asal," katanya.

Lalu, sebelum menonaktifkan NIK KTP itu, Dukcapil DKI dan tingkat kota akan menyosialisasikan kepada warga. Pihaknya akan datang ke kelurahan untuk mengecek secara langsung.

"Tidak ada (penonaktifan secara otomatis). Itu nanti akan kita verifikasi. Kalau benar masih di sana (Jakarta), kami keluarkan dari daftar NIK yang bakal dihapuskan," ujar Budi.

Budi mengatakan, warga yang tidak lagi berdomisili di Jakarta juga bisa secara sadar mengurus perpindahan tempat tinggal ke luar daerah.

"Tidak ada yang otomatis, kecuali dia sadar untuk pindah. Kalau misal itu (bersikeras) mengaku tinggal di situ (Jakarta) bisa datang ke kelurahan, kita verifikasi sama-sama," kata Budi.

Petugas akan melakukan verifikasi terlebih dulu sebelum melakukan penonaktifan.

Menurut Budi ada sekitar 94 ribu NIK warga akan dinonaktifkan dengan rincian 81 ribu KTP yang telah meninggal dunia dan 13 ribu warga yang tidak tercatat lagi di RT tempat tinggalnya. Penonaktifan NIK warga yang berdomisili di luar Jakarta dilakukan secara bertahap mulai April 2024. "Mulai April, kita lakukan bertahap per bulan nanti, jadi masyarakat bisa mengecek datanya," kata Budi. ● **yan**

Legislator Desak Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Tanah Abang

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan parkir liar di kawasan perbelanjaan Tanah Abang demi menjamin kenyamanan pengunjung.

"Kalau parkir liar maka kewajiban dari pihak terkait untuk segera melakukan penertiban tindakan," kata Ismail saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (21/3).

Ismail menuturkan mengingat momen ini menjelang Hari Raya Idul Fitri

tentunya kunjungan di Tanah Abang meningkat.

Menurut dia, hal ini bisa menjadi peluang bagi oknum tertentu untuk uang terbiasa mengurus parkir liar di kawasan tersebut.

"Pasti akan menjadi dijadikan peluang bagi siapa pun termasuk yang selama ini terbiasa mengurus parkir liar," ujarnya.

Karena itu, agar tidak mempengaruhi jumlah kunjungan ke Tanah Abang maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa lebih baik

menertibkan.

"Agar itu tidak terjadi, maka pihak terkait harus segera menertibkan sambil juga bekerja sama dengan tenaga wilayah setempat," ujarnya.

Dia menuturkan warga setempat memang punya niat baik untuk menyediakan lahan parkir namun seharusnya tetap menerapkan tarif wajar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu mengajak warga setempat untuk berkomunikasi mengenai tata pengelolaan parkir. ● **yan**



FOTO: ANTARA

MUDIK LEBARAN LEBIH AWAL DI TERMINAL KALIDERES

Sejumlah calon pemudik berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan bus di Terminal Kalideres, Jakarta, Kamis (21/3). Sebagian warga memilih mudik lebih awal guna menghindari lonjakan penumpang dan juga tingginya harga tiket.

PENGUMUMAN
Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MITRA ANDALAN HASIL (dalam Likuidasi), berkedudukan di Jakarta Pusat, tanggal 21 Maret 2024, Nomor 31, yang dibuat dihadapan Martini, SH, Notaris di Jakarta, telah diputuskan:
1. Menyetujui pembubaran/likuidasi Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Drs. Johannes Hermawan selaku Likuidator untuk menyelesaikan aset-aset segala kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses pembubaran/likuidasi Perseroan.
Segala keberatan dan sanggahan dapat diajukan kepada:
Drs. Johannes Hermawan
GEDUNG MENARA ERA LT. 6 NO. 3, JL. SENEN RAYA NO. 135-137, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Jakarta, 22 Maret 2024
Likuidator